

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Pada hakekatnya, alam telah menyediakan air minum yang dibutuhkan, namun desakan pertumbuhan penduduk serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan. Daya dukung air baku yang terbatas, karena pencemaran air, pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik dan adanya perubahan iklim, merupakan isu lingkungan yang penting untuk ditangani. Di lain pihak, ketersediaan air pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan di suatu wilayah hanya akan terjadi bila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum.

Pemerintah harus bertanggungjawab dalam pengembangan sarana dan prasarana air minum. Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya melalui jaringan perpipaan telah dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai pendekatan baik bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan). Pada awalnya, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan era desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan pengembangan SPAM menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Saat ini sering dijumpai permasalahan ketersediaan air bersih akibat penurunan kualitas lingkungan hidup, pada sisi lain kebutuhan air bersih semakin meningkat.

Menurut Suripi dalam (Endar Budi Sasongko, 2014), pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk dunia sebesar 6,121 milyar diperlukan air bersih sebanyak 367 km<sup>3</sup> per hari, maka pada tahun 2025 diperlukan air bersih sebanyak 492 km<sup>3</sup> per hari, dan pada tahun 2100 diperlukan air bersih sebanyak 611 km<sup>3</sup> per hari. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya air adalah kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, termasuk penurunan kualitas air kondisi seperti ini dapat menyebabkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. sehingga secara konsep, Pellokila dalam (TALAHATU, 2018) menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan terjadinya kelangkaan ketersediaan air, orang mulai terpancing untuk berpikir dan memandang air sebagai komoditas ekonomi. Seperti yang tercantum dalam Dublin Principles, Kelangkaan air dianggap sebagai peluang ekonomi. Dublin principles mempunyai beberapa komponen. Pertama, air adalah sumber daya yang terbatas dan rentan, penting untuk menopang kehidupan, pembangunan, dan lingkungan. Kedua, pembangunan dan pengelolaan air harus berdasarkan pendekatan partisipatif, menyertakan pengguna, perencana, dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan. Ketiga, perempuan memainkan peran penting utama dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan air. Keempat, air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh penggunaannya, dan harus dianggap sebagai benda ekonomi(Maksum, 2004) .Bagi pihak pengelola air, kelangkaan air harus diatasi dengan efisiensi pemakaian, yang ditindaklanjuti dengan pembatasan pemakaian air dengan cara menaikkan nilai ekonomi air sehingga orang akan berhati-hati memakai air karena mahal. Saat sebagian orang tertarik untuk menjual air langsung sebagai barang komoditi, beberapa pemakai air lainnya mulai terganggu. Hal ini

karena air juga digunakan untuk budidaya pertanian. Ketersediaan air juga akan dapat menunjang peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan petani, lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan. Untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan lingkungan seperti ini dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi.

Faktor lain yang juga menjadi kendala adalah kualitas dan kuantitas sumber air baku sendiri yang terus menurun akibat perubahan tata guna lahan (termasuk hutan) yang mengganggu sistem siklus air. Peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk di perkotaan akibat urbanisasi, masalah kemiskinan serta buruknya kemampuan manajerial operator air minum itu sendiri juga ikut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk mengakses air minum yang layak. Berbagai aspek sanitasi seperti masih rendahnya kesadaran penduduk tentang lingkungan, dan masih buruknya sistem pembuangan limbah sangat memengaruhi aksesibilitas air dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2007, menyebutkan bahwa hampir 50% rumah tangga mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih pada musim kemarau. Ketersediaan air minum yang minim ini belum dapat memenuhi kebutuhan air penduduk yang setiap saat bertambah. dan Semakin meningkatnya populasi penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan akan air. Hal ini menimbulkan terjadinya kekurangan air yang berdampak pada ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Ketidakseimbangan air memicu munculnya persoalan kekurangan air yang hampir selalu dialami di beberapa wilayah, termasuk Kota Kupang. Sedangkan hasil Riskesdas tahun 2010, menunjukkan bahwa 42% penduduk di Provinsi NTT hanya menggunakan 20 liter air per orang per hari. Rendahnya pemakaian air di NTT menempatkan provinsi ini pada urutan pertama dalam hal pemanfaatan air yang rendah di Indonesia (Theodolfi & Waangsir, 2014). Hal

ini disebabkan adanya ketidakseimbangan air yang memicu munculnya persoalan kekurangan air yang hampir selalu dialami di beberapa wilayah, termasuk Kota Kupang.

Persoalan air, tidak saja terkait ketersediaan air minum, tetapi juga penguasaan atas pengelolaan sumber daya air yang ada. Porsi terbesar pengelolaan sumber daya air dan aset dimiliki oleh Kabupaten Kupang. Pemerintah Kota Kupang menganggap *water governance* yang berlangsung selama ini bukan model yang baik, sebab *water sustainability* tidak terjamin dan pemerintah kota tidak punya kontrol atas pengelolaan air di Kota Kupang. Agar pemerintah kota memiliki kontrol, dibangunlah beberapa skenario. Pertama, mengambilalih PDAM Kabupaten Kupang. Jelas skenario ini sangat bergantung pada kesediaan pemerintah Kabupaten Kupang untuk melepaskan aset yang dimiliki. Kedua, membuat bendungan dan memiliki kontrol atas sumber daya air yang dihasilkan. Saat ini, kapasitas air yang diproduksi sebesar 728 liter/detik. Debit yang dibutuhkan berkisar antara 243 liter/detik pada tahun 2010 dan 513 liter/detik pada tahun 2015. Dalam skenario ini diasumsikan akan menambah debit air yang akan melayani 50 ribuan KK calon penerima sambungan baru.(Talan, 2015)

Kota Kupang merupakan Ibu Kota Provinsi NTT dan menjadi pusat kegiatan bagi Provinsi tersebut, terutama sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, pendidikan dan aktivitas lainnya, sangat membutuhkan pelayanan air bersih yang cukup ke depan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tahun 2007, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang memanfaatkan lebih kurang 80.967.324 m<sup>3</sup> dan didistribusikan kepada 22.157 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata air bersih yang didistribusikan oleh PDAM kepada setiap konsumen adalah kurang lebih 3654,25 m<sup>3</sup> /tahun. Wilayah Kota Kupang yang merupakan pusat berbagai kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, persentase rumah tangga yang mengalami kesulitan air bersih terutama pada musim kemarau adalah sebesar 35,8% dengan tingkat konsumsi air

tertinggi, yaitu >50 liter per hari.<sup>2</sup> Namun, Pallendou dalam (Theodolfi, 2014) mengidentifikasi masalah utama yang berkaitan dengan distribusi air bersih di Kupang, NTT. Pallendou menggambarkan bahwa untuk mendapatkan air sebanyak 5 liter, masyarakat di wilayah ini harus menunggu hingga dua hari. Disamping itu, kondisi kualitas air yang dijadikan sebagai sumber air bersih masyarakat di kota ini juga semakin menurun. Hasil kajian survei terhadap kualitas beberapa sumber air bersih yang ada di Kota Kupang tahun 2008, menunjukkan bahwa rata-rata kandungan total Coliform dan E.coli sebesar 45/100 ml. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air permukaan yang ada di kota ini semakin menurun kualitasnya dan kuantitasnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan segala aktivitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warganya, maka pemerintah Kota Kupang berkewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan sumber air bersih yang ada di wilayah ini, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan

Kota Kupang memiliki beberapa potensi sumber air yang dikembangkan berupa 7 Daerah Aliran Sungai (Sungai Dendeng, Sungai Salak, Sungai Kolano, Sungai Alak, Sungai Oesapa Besar, Sungai Baumata dan Sungai Osmok), 11 embung potensial, 13 mata air serta 33 sumur bor (Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, P2AT Kota Kupang).

Mata air Baumata terletak di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Masyarakat yang berdomisili di Desa Baumata merupakan campuran suku di NTT, yaitu suku asli Timor, Rote, Sabu, Alor dan Flores sehingga budaya masyarakatnya sangat heterogen. Keanekaragaman budaya ini terletak pada penggunaan bahasa daerah, adat istiadat, dan corak tenun pakaian daerah. Pada umumnya memiliki pekerjaan utama sebagai petani dan peternak.

Mata air Baumata dimanfaatkan oleh PT. Aguamor Timorindo Baumata yang merupakan perusahaan air minum kemasan dengan merek dagang Aguamor. Air minum kemasan ini dinikmati oleh masyarakat umum terutama kota Kupang. Kolam renang yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang menyuplai kebutuhan airnya dari mata air Baumata.

Mata air Baumata dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi PDAM Kabupaten Kupang yaitu PDAM Tirta Lontar. Sampai saat ini selain melayani wilayah Kabupaten Kupang, PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang juga masih memberikan pelayanan air bersih di wilayah Kota Kupang. Dari jumlah pelanggan pada akhir tahun 2012, jika dihitung dengan besaran cakupan pelayanan yang dicapai oleh PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang adalah 29,99% dari total jumlah penduduk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan rincian cakupan pelayanan untuk penduduk Kota Kupang sebesar 56,01% dan untuk Kabupaten Kupang sebesar 1,83% (Arto, 2017).

Kapasitas terpasang sumber mata air Baumata adalah 75 lt/dtk dan kapasitas produksinya adalah 40 lt/dtk. Daerah pelayanan untuk mata air Baumata meliputi Penfui, Liliba, Oebufu, Bundaran PU, dan Perumnas. Dengan menggunakan sistem gravitasi, jam pelayanan operasi untuk mata air Baumata adalah 24 Jam.

Sumber mata air Baumata telah di kelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah Kota Kupang . sebagian masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya air secara baik, namun ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat secara baik hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan air yang kurang baik sehingga menyebabkan pemanfaatan air tidak optimal dan menimbulkan masalah sosial.

Tetapi permasalahan utamanya adalah menurunnya debit air akibat maraknya penebangan liar di sekitar sumber mata air terutama di kawasan hutan bagian hulu yang merupakan daerah tangkapan air dan maraknya penebangan liar yang terjadi di bagian

hulu mengakibatkan sebagian wilayah tangkapan air menjadi rusak. Permasalahan lain yang dihadapi adalah sebagian besar masyarakat sekitar belum menyadari akan pentingnya sanitasi sumber mata air tersebut sehingga keterlibatan masyarakat dalam memelihara sumber mata air sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat yang rendah terhadap aset yang dimiliki serta kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai informasi terkait pembangunan dan pelaporan.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana tata kelola mata air baumata, sehingga penulis mengambil judul “ Tata Kelola Mata Air Baumata di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut “ Bagaimana tata kelola mata air Baumata di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan makalah ilmiah ini yaitu untuk mengetahui tata kelola mata air di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat skripsi ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan tentang tata kelola mata Air di Baumata
- b. Hasil dari skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pelayanan dibidang air bersih

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, skripsi ini juga terdapat manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya tata kelola air yang baik dapat meminimalisir krisis air pada musim kemarau

- b. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola setiap sumber mata air sehingga harapannya dapat menunjang pemenuhan kebutuhan air minum disuatu daerah khususnya di Kota Kupang

- c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan tentang tata kelola air dan menjadi acuan untuk mengelola sumber mata air di masyarakat ketika sudah terjun didunia kerja.